SIARAN PERS

TANGGAL:
13 Oktober 2026

Nomor: 32/HMS/SP/X/2026

Rekrutmen Pengawas Ad Hoc Jadi Sorotan, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Tampung Aspirasi GP Ansor

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo – Persyaratan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ingin menjadi pengawas pemilu ad hoc serta kebutuhan sumber daya manusia yang memahami karakteristik wilayah menjadi sorotan dalam pertemuan Bawaslu Kabupaten Gorontalo bersama Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Gorontalo di Kecamatan Tibawa, Senin (12/10/2026).

Aspirasi tersebut mengemuka dalam diskusi mengenai demokrasi dan evaluasi pengawasan pemilu. GP Ansor menilai mekanisme perekrutan pengawas perlu menjadi bahan pembahasan, terutama terkait persyaratan yang dapat menjadi kendala bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilu serta pentingnya kompetensi pengawas dalam memahami kondisi wilayah tugasnya.

Perwakilan GP Ansor Kabupaten Gorontalo, Idris Mertosono, menyoroti persyaratan bagi anggota BPD yang ingin menjadi pengawas pemilu. Menurutnya, kewajiban mengundurkan diri dari jabatan BPD menjadi salah satu persoalan yang perlu disampaikan sebagai aspirasi untuk bahan evaluasi mekanisme perekrutan pengawas ad hoc.

Selain persyaratan, Idris menekankan pentingnya mempertimbangkan pemahaman wilayah dalam proses perekrutan Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Pemahaman terhadap karakteristik masyarakat dan dinamika lokal dinilai penting agar pengawas dapat menjalankan tugas secara efektif ketika menghadapi persoalan di lapangan.

Idris juga mengingatkan bahwa persiapan menuju Pemilu 2029 perlu dilakukan sejak dini. Ia berharap kader GP Ansor memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif maupun mengikuti proses perekrutan penyelenggara pemilu ad hoc di KPU atau Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perwakilan GP Ansor lainnya, Angky Adam, menyambut positif pertemuan tersebut. Ia menyampaikan bahwa GP Ansor sebagai organisasi kemasyarakatan memiliki komitmen

membangun komunikasi dan kolaborasi dengan lembaga serta instansi pemerintah. Dukungan terhadap pengawasan partisipatif, menurutnya, menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga kualitas demokrasi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Zulfikar A. Uba, menyampaikan bahwa masukan masyarakat merupakan bagian penting dari evaluasi pengawasan pemilu. Aspirasi terkait mekanisme perekrutan pengawas ad hoc akan menjadi catatan untuk disampaikan kepada Bawaslu RI sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Under S. Lawani, menekankan pentingnya memperkuat jejaring pengawasan partisipatif dengan organisasi kemasyarakatan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas partisipasi publik dan memperkuat pengawasan pemilu melalui keterlibatan berbagai elemen masyarakat.

Pertemuan ini turut dihadiri Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Rahmawaty M. Sulaiman, Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas, Muhammad Yusran Bahri, serta staf sekretariat.

Melalui dialog dengan GP Ansor, Bawaslu Kabupaten Gorontalo menghimpun aspirasi sebagai bahan evaluasi dan penguatan pengawasan partisipatif. Masukan tersebut diharapkan dapat mendukung persiapan pengawasan yang lebih baik dalam menghadapi tahapan Pemilu 2029.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Gorontalo
Jl. Kolonel Rauf Mo'o No.1, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo
Email: humasbawaslukabgor@gmail.com
Situs: gorontalokab.bawaslu.go.id